

# **DAMPAK KEMANDIRIAN PENYULUH TERHADAP KEBERDAYAAN PETANI KELAPA SAWIT POLA SWADAYA DI PROVINSI RIAU**

**Rosnita, Roza Yulida, Novia Dewi, Arifudin, dan Yulia Andriani**

Jurusan Agribisnis Faperta Universitas Riau (UR)

Jl. Bina Widya Km 12,5 Panam Pekanbaru Telp. (0761) 63270 Fax (0761)63271

Email: rosnita\_ita@yahoo.co.id

## **ABSTRAK**

Kegiatan penyuluhan pertanian kepada petani sebagai proses pembelajaran bertujuan agar mampu mengorganisasikan dirinya dalam mengakses berbagai hal guna meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya. Produktivitas dan pendapatan petani kelapa sawit pola swadaya lebih rendah dari petani plasma yang mendapatkan pembinaan dari perusahaan. Pertanyaan yang perlu dijawab apakah penyuluh yang membina petani pola swadaya kurang mandiri sehingga berdampak pada ketidakberdayaan petani swadaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat kemandirian penyuluh dan dampaknya terhadap keberdayaan petani kelapa sawit pola swadaya di Provinsi Riau. Penelitian dilakukan di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan. Sampel penyuluh pada kedua kecamatan berjumlah 13 orang diambil secara acak, dan sampel petani 160 orang petani kelapa sawit pola swadaya dari 16 kelompok yang ada di kedua kecamatan (3 pengurus dan 7 orang anggota secara *random*). Analisis kemandirian penyuluh dan keberdayaan petani dilakukan menggunakan *Skala Likert's Summated Rating (SLR)*, dengan nilai skala satu sampai tiga mengukur kemandirian penyuluh dan satu sampai lima mengukur keberdayaan petani. Hasil penelitian menunjukkan, penyuluh telah mandiri secara (ekonomi, intelektual, pembinaan, emosional dan sosial) dimana kemandirian yang paling rendah adalah kemandirian intelektual. Dampak kemandirian penyuluh terhadap petani sawit pola swadaya telah membuat petani cukup berdaya akan tetapi dari segi sumberdaya manusia petani masih kurang berdaya.

Kata kunci: kelapa sawit, penyuluh, keberdayaan, kemandirian

## **PENDAHULUAN**

Sektor pertanian memiliki peran yang penting dalam perekonomian nasional. Keberadaan sektor ini sebagai penyedia bahan pangan bagi penduduk, bahan baku bagi industri, penyerap tenaga kerja, penyumbang devisa bagi negara dan sumber pendapatan bagi sebagian besar penduduk, sehingga keberadaan sektor ini turut menentukan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi pertanian yang strategis dan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Riau. Berdasarkan data, pada tahun 2013 Provinsi Riau merupakan provinsi yang mempunyai perkebunan kelapa sawit terluas dengan luas areal seluas 2,30 juta Ha disusul berturut-turut Provinsi Sumatera Utara seluas 1,39 juta Ha, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 1,16 juta Ha dan Sumatera Selatan dengan luas 1,11 juta Ha serta provinsi-provinsi lainnya (Direktoran Jendral Perkebunan 2014).

Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Pelalawan merupakan kabupaten yang memiliki potensi perkebunan kelapa sawit dibanding kabupaten lainnya di Provinsi Riau, dimana Rokan Hilir menempati urutan kedua dari luas areal sawit yang mencapai 257.373 ha (Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 2013). Pengelolaan perkebunan ini dilakukan dengan pola inti (perusahaan) dan plasma (rakyat) pada perkebunan swasta dan perkebunan rakyat yang dikelola secara swadaya, di kabupaten ini Perkebunan kelapa sawit rakyat dominan terdapat di Kecamatan Kubu mencapai 7.203,13 Ha dengan produktivitas



2.314,82 Kg/Ha (Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir, 2013). Pada Kabupaten Pelalawan luas lahan kelapa sawit 305.630 Ha dengan produksi tahun 2013 mencapai 1.147.126 ton tandan buah segar (TBS) dan Kecamatan Langgam memiliki luas lahan kelapa sawit sebanyak 12.506 Ha dengan produksi 856.751 ton (BPS Riau, 2014). Permasalahan yang ada bahwa produktivitas petani perkebunan rakyat (pola swadaya) masih berada atau lebih rendah dari produktivitas petani plasma yang bernaung dibawah perusahaan (inti).

Hasil yang mampu dicapai oleh petani rakyat dengan pola swadaya tidak terlepas dari peran penyuluh dalam membina petani, dimana penyuluh masih sangat kurang berperan dalam membina petani kelapa sawit pola swadaya di Kabupaten Rokan Hilir (Rosnita *et al*, 2015). Pertanyaan yang perlu dijawab adalah mengapa produktivitas hasil kelapa sawit yang dicapai oleh petani swadaya selalu berada dibawah hasil yang dicapai petani plasma. Apakah penyuluh masih belum mandiri dalam membina petani swadaya. (Lie, 2004 dalam Sapar, 2011), menyatakan kemandirian adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau tugas sehari-hari sesuai dengan tahapan perkembangan dan kapasitasnya. Sapar dalam penelitiannya menyatakan kemandirian seseorang meliputi aspek material, intelektual, pembinaan, emosional dan sosial. Kemandirian material merupakan kemampuan memenuhi kebutuhan diri sendiri. Kemandirian emosi ditunjukkan dengan kemampuan mengontrol emosi sendiri yang tidak dipengaruhi oleh emosi orang lain. Kemandirian materi/ekonomi ditunjukkan dengan kemampuan mengatur sendiri perekonomian dan tidak tergantungnya pada orang lain. Kemandirian intelektual merupakan kemampuan dalam mengatasi masalah yang dihadapi, dan kemandirian sosial ditunjukkan dengan kemampuan berinteraksi dengan orang lain tanpa tergantung dan menunggu aksi dari orang lain (Sapar, 2011). Apakah kemandirian penyuluh akan memberikan dampak terhadap keberdayaan petani kelapa sawit dalam mengelola usahatani. Pendekatan keberdayaan Masyarakat dapat dirangkum menjadi tiga daur hidup yang disebut "Tridaya": (1) Daur Hidup Pengembangan SDM, (2) Daur Hidup Pengembangan Usaha Produktif, dan (3) Daur Hidup Kelembagaan Kelompok (TKP3 KPK, 2004).

Berdasarkan uraian diatas, maka dampak dari kemandirian penyuluh terhadap keberdayaan petani kelapa sawit pola swadaya perlu dikaji. Penelitian ini bertujuan: 1) mengkaji kemandirian penyuluh, dan 2) Keberdayaan petani kelapa sawit pola swadaya.

## METODA PENELITIAN

Penelitian menggunakan metoda Survei dengan melakukan studi kasus pada Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dengan pertimbangan memiliki luas areal dan jumlah petani kelapa sawit yang lebih banyak dibanding kabupaten lainnya di Provinsi Riau. Waktu penelitian dari bulan Maret sampai Desember 2015. Sampel penyuluh pada kedua kecamatan berjumlah 13 orang diambil secara sensus, dan sampel petani 160 orang petani kelapa sawit pola swadaya dari 16 kelompok yang ada di kedua kecamatan (3 pengurus dan 7 orang anggota secara *random*).

Data primer yang dikumpulkan melalui wawancara terkait dengan kemandirian penyuluh (Safar 2011) dan dampaknya terhadap keberdayaan petani. Keberdayaan petani dilihat dari keberdayaan sumberdaya manusia, ekonomi dan kelembagaan (TKP3 KPK, 2004). Variabel dan indikator kemandirian penyuluh dan keberdayaan petani disajikan pada Lampiran 2.

Analisis kemandirian penyuluh dan keberdayaan petani dilakukan menggunakan *Skala Likert's Summated Rating (SLR)*, dengan nilai skala satu sampai tiga mengukur kemandirian penyuluh dan satu sampai lima mengukur keberdayaan petani. Rentang skala nilai skor dari kemandirian penyuluh dan keberdayaan petani menggunakan rumus:

$$\text{RentangSkala} = \frac{\text{SkalaTertinggi} - \text{SkalaTerendah}}{\text{BanyakSkala}} - 0,01$$

Kategori dari nilai skor berdasarkan rentang skala yang diperoleh disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Nilai Skor dan Katagori dari Kemandirian Penyuluh dan Keberdayaan Petani

<b>Kemandirian Penyuluh dan Keberdayaan Petani</b>	<b>Skor</b>	<b>Katagori</b>
A. Kemandirian Penyuluh	1,00 – 2,32	Rendah
	2,33 – 3,65	Sedang
	3,66 – 5,00	Tinggi
B. Keberdayaan Petani	1,00 – 1,79	Sangat Tidak Berdaya
	1,80 – 2,59	Tidak Berdaya
	2,60 – 3,39	Cukup Berdaya
	3,40 – 4,19	Berdaya
	4,20 – 5,00	Sangat Berdaya

### HASIL PENELITIAN

Keberhasilan pembangunan pada sektor perkebunan khususnya kelapa sawit sangat ditentukan oleh berbagai faktor diantaranya adalah penyuluh sebagai pelaku utama dalam melakukan pembinaan dan petani sebagai ujung tombak terdepan yang mengembangkan usahatani kelapa sawit. Keberdayaan petani dalam mengembangkan kelapa sawit tidak terlepas dari peran dan kinerja penyuluh dalam melaksanakan tugasnya. Penyuluh perkebunan kelapa sawit sudah berperan di Kabupaten Kampar, dimana penyuluhan sudah “sangat berperan” dalam memberikan pembinaan pada petani dan mengembangkan organisasi petani, akan tetapi masih rendah dalam memfasilitasi proses pembelajaran pada petani (Rosnita dkk, 2014). Hasil penelitian Sapar terhadap kompetensi petani Kakao di Empat wilayah Sulawesi Selatan tidak terlepas dari kinerja penyuluh yang sangat ditentukan oleh karakteristik, motivasi dan kemandirian penyuluh pertanian.

#### Kemandirian Penyuluh Pertanian

Kemandirian berarti hal atau keadaan seseorang yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Kata kemandirian berasal dari kata dasar dari yang mendapat awalan ke dan akhiran an yang kemudian membentuk suatu kata keadaan atau kata benda (Bahara, 2008). Kemandirian penyuluh pertanian adalah sikap mampu mengandalkan diri sendiri sehingga dapat bekerjasama dengan siapapun berdasarkan prinsip kesejajaran dan keadilan tanpa bergantung pada pihak lain dalam melakukan penyuluhan, yaitu: (1) kemandirian material/ekonomi, (2) kemandirian intelektual, (3) kemandirian pembinaan, (4) kemandirian emosional dan (5) kemandirian sosial (Sapar, 2011).

Kemandirian material/ekonomi ditunjukkan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan diri sendiri. Kemandirian ini menunjukkan kemampuan mengatur sendiri perekonomian dan tidak tergantungnya kebutuhan ekonomi pada orang lain. Kemandirian ekonomi akan menunjukkan tingkat kesejahteraan seseorang yang dapat dilihat dari 14 indikator untuk menggambarkan kesejahteraan atau kemiskinan seseorang seperti yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kemandirian Materi/Ekonomi Penyuluh

No.	Kemampuan	Skor	Kategori
1	Luas lantai bangunan $\geq 8 \text{ m}^2$	3,92	Mandiri
2	Jenis lantai tanah/semèn/keramik	4,38	Mandiri
3	Jenis dinding bangunan rumbia/papan/tembok	4,23	Mandiri
4	Fasilitas buang air besar di alam/bersama/mandiri	4,38	Mandiri
5	Sumber penerangan minyak tanah/petromak/listrik	4,23	Mandiri
6	Sumber air minum sungai/sumur/ledeng atau bor	4,54	Mandiri
7	Bahan bakar memasak kayu/minyak tanah/gas	3,92	Mandiri
8	Konsumsi daging/ayam/susu per minggu	4,23	Mandiri
9	Membeli pakaian anggt klg dalam setahun	5,00	Mandiri
10	Frekuensi makan anggota klg dalam sehari	5,00	Mandiri
11	Kemampuan membayar berobat ke pukesmas	5,00	Mandiri
12	Pekerjaan utama kepala rumahtangga	5,00	Mandiri
13	Pendidikan tertinggi kepala rumahtangga	4,23	Mandiri
14	Kepemilikan Asset tabungan	5,00	Mandiri
<b>Rata-rata</b>		<b>4,51</b>	<b>Mandiri</b>

Tabel 2 menunjukkan bahwa secara materi/ekonomi penyuluh telah mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya yang ditunjukkan dengan nilai skor 4,51. Kemandirian penyuluh yang berada pada level paling rendah adalah luas lantai bangunan dan bahan bakar yang digunakan dalam memasak. Kemandirian yang sudah tinggi yakni kemampuan membeli pakaian lebih dari satu stel dalam setahun, frekuensi makan anggota keluarga tiga kali dalam sehari, mampu membayar biaya berobat ke Puskesmas dengan pekerjaan utama sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pendidikan penyuluh umumnya tamat Perguruan Tinggi yang minimal SMA, dan mampu memiliki asset yang bernilai diatas Rp 500.000,-

Kemandirian intelektual merupakan kemandirian yang harus dimiliki penyuluh disamping kemandirian ekonomi dalam menjalankan tugas sebagai penyuluh. Safar menyatakan bahwa, kemandirian intelektual merupakan kemandirian yang dimiliki oleh manusia yang mempunyai mental, kemauan keras, sifat jujur, bertanggung jawab dan bermoral tinggi untuk mencapai tujuan dan kebutuhan hidupnya (Safar, 2011). Kemampuan intelektual penyuluh menggambarkan bagaimana kemampuan penyuluh dalam melaksanakan pekerjaan dan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi terkait dengan pekerjaannya sebagai seorang penyuluh. Faktor kemandirian intelektual merupakan salah satu faktor yang mampu meningkatkan kinerja penyuluh (Bahua *et al*, 2010). Tabel 3 menggambarkan kemandirian intelektual penyuluh.

Tabel 3. Kemandirian Intelektual Penyuluh

No	Kemampuan	Skor	Kategori
1	Mengambil keputusan	4,23	Mandiri
2	Mempersiapkan bahan penyuluhan	3,46	Kurang Mandiri
3	Menarik partisipasi masyarakat untuk hadir dalam kegiatan penyuluhan	4,08	Mandiri
4	Membuat pelaksanaan penyuluhan lebih menarik	3,46	Kurang Mandiri
5	Menentukan waktu kegiatan penyuluhan	3,62	Kurang Mandiri
6	Menentukan pencapaian tujuan	4,23	Mandiri
7	Mempersiapkan evaluasi dan pelaporan dalam kegiatan penyuluhan	3,77	Mandiri
<b>Rata-rata</b>		<b>3,84</b>	<b>Mandiri</b>

Tabel 3 menunjukkan bahwa penyuluh telah mandiri secara intelektual dalam melaksanakan tugas selaku penyuluh perkebunan, akan tetapi penyuluh harus meningkatkan kemampuannya dalam mempersiapkan bahan penyuluhan, membuat kegiatan penyuluhan menjadi lebih menarik, dan menentukan waktu kegiatan penyuluhan. Kemampuan intelektual yang rendah (kurang mandiri) tersebut akan menggarkan penyuluh yang kurang kompeten dalam melaksanakan tugasnya. Hasil penelitian Bank Dunia (Hadi, 2000) menyimpulkan bahwa kompetensi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sangat rendah, yang ditunjukkan oleh :1) bekal pengetahuan dan keterampilan penyuluh sangat kurang, seringkali tidak cocok dengan kebutuhan petani, 2) PPL sangat kurang dipersiapkan dan kurang dilatih untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, 3) dalam banyak hal PPL telah ketinggalan informasi dari petani yang dilayaninya (Bahua, 2013).

Pembinaan kepada petani merupakan kegiatan yang harus dilakukan penyuluh agar mampu membentuk kepribadian petani agar mampu berusahatani terbaik (*better farming*), berbisnis terbaik (*better business*), dan mampu untuk hidup lebih sejahtera (*better living*) sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan penyuluhan. Kemandirian penyuluh dalam membina petani disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Kemandirian Pembinaan Petani oleh Penyuluh

No	Kemampuan	Skor	Kategori
1	Membina kelompok tani yang ada	4,54	Mandiri
2	Membina dalam budidaya agar produksi petani meningkat	3,92	Mandiri
3	Membina menentukan harga komoditi agar layak	3,46	Kurang Mandiri
4	Membina menentukan saluran pemasaran yang baik	3,92	Mandiri
<b>Rata-rata</b>		<b>3,96</b>	<b>Mandiri</b>

Tabel 4 menunjukkan bahwa penyuluh telah mandiri dalam membina petani terutama membina kelompok tani yang ada dalam budidaya agar produksi yang dihasilkan petani meningkat dan membina dalam menentukan saluran pemasaran, akan tetapi penyuluh masih kurang mampu dalam membantu petani untuk memperoleh harga yang layak sehingga posisi tawar petani masih rendah dan *share* harga yang diterima petani masih kecil. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Indraningsih bahwa penyuluh dinilai petani belum berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan petani, karena menurut Tjitropranoto (2003) materi penyuluhan selama tiga dekade lebih didominasi oleh aspek alih teknologi, berorientasi pada kepentingan program/proyek untuk mencapai target suatu produksi. Cakupan materi penyuluhan perlu diperluas, tidak lagi terbatas pada teknologi produksi namun juga teknologi panen, pengolahan, pengemasan, transportasi, informasi harga, dan informasi pasar, sehingga usahatani yang dikelola petani menguntungkan dan berkelanjutan (Indraningsih *et al*, 2010).

Kecerdasan emosional adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara selektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energy dan pengaruh yang manusiawi. Kecerdasan emosi menuntut penilikan perasaan, untuk belajar mengakui, menghargai perasaan pada diri orang lain serta menanggapi dengan tepat, menerapkan secara efektif emosi dalam kehidupan sehari-hari (Cooper dalam Syaroji, 2016).

Kemandirian emosional penyuluh adalah kemampuan sikap emosional penyuluh dalam mengatasi berbagai masalah pada penyuluhan pertanian demi menjadikan petani yang lebih baik. Kemandirian emosional penyuluh disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Kemandirian Emosional Penyuluh

No	Kemampuan	Skor	Kategori
1	Tidak menutup diri dalam melaksanakan program dan keputusan	4,38	Maendiri
2	Tidak menutup diri dalam membina petani dalam budidaya	3,77	Mandiri
	<b>Rata-rata</b>	<b>4,08</b>	<b>Mandiri</b>

Tabel 5 menunjukkan bahwa penyuluh telah mandiri secara emosional dalam melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya penyuluh tidak menutup diri dan sadar bahwa keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat sehingga selalu bekerjasama dan menjaga hubungan baik dengan petani dalam melaksanakan program sehingga program yang disusun merupakan program yang dibutuhkan dan mampu memecahkan masalah petani dan mampu meningkatkan partisipasi dan kemampuan petani sehingga petani mampu bertani dengan lebih baik (*better business*) sesuai dengan tujuan penyuluhan yang ingin dicapai. Hal ini sesuai dengan teori Goleman bahwa kecerdasan emosi dapat diukur dari lima kecakapan dasar kecerdasan emosi yaitu: kesadaran diri, manajemen diri, motivasi, empati, dan manajemen hubungan. Hasil penelitian Syaraji mengungkapkan bahwa kecerdasan emosional memiliki hubungan kerja yang cukup kuat dan searan dengan budaya kerja. Seorang penyuluh yang dengan kecerdasan emosional yang tinggi memiliki kemampuan nyata untuk mengarahkan interaksi-interaksi tim baik dalam melakukan penyuluhan maupun dalam berinteraksi dengan masyarakat (Syaraji, 2016).

Penelitian Bahua tentang Model Pengembangan Penyuluh Pertanian di Provinsi Gorontalo menyimpulkan meningkatnya kemandirian intelektual dan kemandirian sosial akan akan menyebabkan kompetensi penyuluh akan semakin meningkat (Bahua, 2010). Tabel 6 menggambarkan kemandirian sosial penyuluh.

Tabel 6. Kemandirian Sosial Penyuluh

No	Kemampuan	Skor	Kategori
1	Membina hubungan dengan pihak lain	3,77	Mandiri
2	Mengembangkan strategi adaptasi dengan berbagai pihak	4,08	Mandiri
3	Menjaga kebebasan (independensi diri)	4,14	Mandiri
	<b>Rata-rata</b>	<b>4,00</b>	<b>Mandiri</b>

Tabel 6 menunjukkan bahwa penyuluh secara sosial mandiri dalam mengatasi berbagai masalah dan tidak menutup diri dalam melaksanakan program dan membina petani. Hasil penelitian Marliati (2008) tentang faktor-faktor Kabupaten Kampar menggambarkan secara sosial penyuluh pertanian mampu melakukan interaksi dengan petani, tokoh masyarakat, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat tanpa harus tergantung dan menunggu aksi orang lain dalam melaksanakan program penyuluhan untuk membantu meningkatkan produktivitas usahatani (Marliati, 2008).

Menurut Monks et al (2001), kemandirian meliputi perilaku mampu berinisiatif, mampu mengatasi hambatan/masalah, memiliki rasa percaya diri dan dapat melakukan segala sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain. Havighurst (1974) dalam Bahua mengemukakan empat aspek yang dapat mempengaruhi kemandirian yaitu: 1) aspek emosi, 2) aspek ekonomi, 3) aspek intelektual, dan 4) aspek sosial (Bahua et al, 2013). Kemandirian penyuluh dalam melaksanakan tugasnya dalam kegiatan penyuluhan perkebunan khususnya kelapa sawit di Provinsi Riau disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Kemandirian Penyuluh dalam Melaksanakan Kegiatan Penyuluhan

No	Kemandirian	Skor	Kategori
1	Kemandirian Ekonomi	4,51	Mandiri
2	Kemandirian Intelektual	3,84	Mandiri
3	Kemandirian Pembinaan	3,96	Mandiri
4	Kemandirian Emosional	4,08	Mandiri
5	Kemandirian Sosial	4,00	Mandiri
	<b>Rata-rata</b>	<b>4,08</b>	<b>Mandiri</b>

Tabel 7, menunjukkan bahwa secara rata-rata penyuluh perkebunan telah mandiri dalam menjalankan tugasnya selaku penyuluh yang ditunjukkan dengan nilai skor 4,08. Kemandirian penyuluh yang berada pada level paling tinggi adalah kemandirian ekonomi yang diukur dari 14 indikator dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Hal ini ditunjang oleh status penyuluh yang sudah pegawai negeri (PNS) dan sebagian besar berpendidikan tamat perguruan tinggi. Sehingga penyuluh sudah memiliki mata pencaharian tetap dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Secara rata-rata kemandirian intelektual penyuluh berada pada level yang paling rendah, hal ini dikarenakan penyuluh jarang sekali mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan seminar atau pelatihan sehingga penyuluh tidak memiliki ilmu atau informasi yang cukup untuk menunjang kemampuannya dalam melaksanakan tugas sehingga penyuluh kurang mampu menciptakan kegiatan penyuluhan yang menarik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Bank Dunia (Hadi, 2000) menyimpulkan bahwa kompetensi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sangat rendah, yang ditunjukkan oleh :1) bekal pengetahuan dan keterampilan penyuluh sangat kurang, seringkali tidak cocok dengan kebutuhan petani, 2) PPL sangat kurang dipersiapkan dan kurang dilatih untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, 3) dalam banyak hal PPL telah ketinggalan informasi dari petani yang dilayaninya (Bahua, 2013).

#### Keberdayaan Petani Kelapa Sawit Pola Swadaya

Soedijanto (2003) menyatakan bahwa mutu SDM petani akan dapat mendukung pembangunan pertanian kini dan masa mendatang manakala penyuluhan merupakan proses pemberdayaan, bukan proses transfer teknologi. Menyuluh bukannya “mengubah cara bertani” melainkan “mengubah petani” melalui 6 dimensi belajar (*learning*) yaitu : a) *learning to know* (penguasaan konsep informasi, pemahaman lingkungan, rasa senang memahami, mengerti dan menemukan sesuatu), b) *learning to do* (penekanan pada *skill* tingkat rendah ke tingkat tinggi menuju kearah kompetensi), c) *learning to live together* (mengetahui diri sendiri, mengenal orang lain, menemukan tujuan bersama, bekerjasama dengan orang lain), d) *learning to be* (mecahkan masalah sendiri, mengambil keputusan dan memikul tanggung jawab, belajar untuk disiplin), e) *learning society* (mengembangkan diri secara utuh, terus menerus), dan f) *learning organization* (belajar memimpin, belajar berorganisasi, belajar mengajarkan kepada orang lain (Sadono, 2008). Tujuan dari pendekatan ini adalah pemberdayaan petani sehingga menjadi petani yang mandiri, dimana penyuluh lebih berperan sebagai fasilitator, pencari serta pemberi pilihan-pilihan kepada petani. Petani mampu mengambil keputusan pilihan terbaik baginya sehingga mampu meraih peluang dan menghadapi tantangan globalisasi ekonomi.

Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat dapat dirangkum menjadi tiga daur hidup, yang disebut “Tridaya” (TKP3 KPK, 2004) yaitu: 1) Daur hidup pengembangan SDM dalam kelembagaan kelompok orang miskin; 2) Daur hidup pengembangan usaha produktif dalam kelembagaan kelompok orang miskin meliputi; dan 3) Daur hidup kelembagaan kelompok orang miskin.

Pemberdayaan sumberdaya manusia adalah suatu proses kegiatan usah untuk lebih memberdayakan “daya manusia” melalui perubahan dan pengembangan manusia itu sendiri, berupa kemampuan (*competency*), kepercayaan (*confidency*), wewenang (*authority*), dan tanggungjawab (*responsibility*) dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan (*activities*) organisasi untuk meningkatkan kinerja (*performance*) sebagaimana diharapkan (Anonim, 2008). Hasil penelitian terhadap keberdayaan SDM petani kelapa sawit pola Swadaya disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Keberdayaan Sumberdaya Manusia (SDM) Petani Kelapa Sawit Pola Swadaya

No	Sumber daya manusia	Skor	Kategori
1	Pengetahuan petani meningkat	2,53	Kurang Berdaya
2	Sikap petani berubah ke arah yang lebih baik	2,61	Cukup Berdaya
3	Keterampilan petani meningkat	2,31	Kurang Berdaya
<b>Rata-rata</b>		<b>2,48</b>	<b>Kurang Berdaya</b>

Tabel 8 menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan perkebunan terutama kelapa sawit yang dilakukan masih kurang memberdayakan petani. Keberdayaan sumberdaya manusia yang berada pada level paling tinggi baru kearah perubahan sikap petani kearah yang lebih baik dalam melakukan usahatani kelapa sawit akan tetapi petani kurang mampu dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga petani menjadi kurang berdaya dari sisi pengetahuan dan keterampilan, keterampilan petani meningkat berada pada level yang paling rendah dari keberdayaan sumberdaya manusia petani. Kurang berdayanya petani karena kurang mandirinya penyuluh dalam mempersiapkan materi penyuluhan (Tabel 3) sehingga kegiatan penyuluhan yang dilakukan kurang mampu memberdayakan pengetahuan dan keterampilan petani. Kurang mandirinya penyuluh dalam menyusun materi penyuluhan karena penyuluh kurang mendapatkan kesempatan dalam mengikuti pelatihan atau seminar sehingga terbatas dalam informasi yang dimiliki untuk menyusun materi penyuluhan sehingga menjadi lebih menarik, sesuai dengan kebutuhan petani, dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh petani. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Strategi Pemberdayaan Masyarakat untuk mengembangkan Usaha Kecil dan Mikro (UKM) tidak bisa hanya dibidang ekonomi permodalan saja, namun juga harus berorientasi secara keseluruhan atas kebutuhan UKM baik secara individu maupun kelompok. Langkah yang dapat ditempuh yaitu dengan cara mendorong terjadinya partisipasi masyarakat antara lain melalui: identifikasi potensi, analisis kebutuhan, rencana kerja bersama, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan (Karsidi, 2007).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya (Hutomo, 2000). Keberdayaan ekonomi produktif petani disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Keberdayaan Ekonomi Petani Kelapa Sawit Pola Swadaya

No	Ekonomi Produktif	Skor	Kategori
1	Mampu meningkatkan jumlah modal	2,68	Cukup Berdaya
2	Mampu meningkatkan jumlah tenaga kerja	3,08	Cukup Berdaya
3	Mampu meningkatkan keuntungan	2,68	Cukup Berdaya
<b>Rata-rata</b>		<b>2,81</b>	<b>Cukup Berdaya</b>

Tabel 9, memperlihatkan bahwa kemandirian penyuluh dalam kegiatan penyuluhan kepada petani kelapa sawit telah mampu membuat petani kelapa sawit berada pada level cukup berdaya terutama dalam meningkatkan modal, jumlah tenaga kerja, dan keuntungan. Keberdayaan yang berada pada level tertinggi adalah dalam penggunaan tenaga kerja dimana petani sudah mampu menggunakan tenaga kerja luar keluarga dalam mengelola usaha tani kelapa sawit yang dijalankan dengan membayar upah tenaga kerja, akan tetapi keterbatasan masih dihadapi pada kemampuan meningkatkan modal dan keuntungan. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan Hutomo, bahwa salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat tunadaya dalam hal akses untuk memperoleh modal dan rendahnya gaji/upah yang diterima masyarakat karena keterampilan yang terbatas dan sikap mental yang buruk (Hutomo, 2000).

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak cukup hanya dengan pemberian modal bergulir, tetapi juga harus ada penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, penguatan sumberdaya

manusianya, penyediaan prasarananya, dan penguatan posisi tawarnya. Tabel 10 berikut ini menggambarkan keberdayaan kelembagaan ekonomi petani kelapa sawit.

Tabel 10. Keberdayaan Kelembagaan Petani Kelapa Sawit Pola Swadaya

No	Kelembagaan	Skor	Kategori
1	Kelompok tani memiliki tujuan yang jelas	3,48	Berdaya
2	Tujuan kelompok-kelompok tani tercapai	3,35	Cukup Berdaya
3	Kelompok tani memiliki struktur yang jelas	3,99	Berdaya
4	Kelompok tani menyusun rencana defenitif kelompok (RDK)	2,58	Kurang Berdaya
5	Kelompok tani menyusun rencana defenitif kebutuhan kelompok (RDKK)	2,30	Kurang Berdaya
<b>Rata-rata</b>		<b>3,14</b>	<b>Cukup Berdaya</b>

Tabel 10 menunjukkan bahwa kelembagaan petani sudah cukup berdaya dimana kelompok tani telah memiliki struktur dan tujuan yang jelas, akan tetapi kelompok masih kurang berdaya dalam menyusun RDK dan RDKK kelompok.

Berdasarkan konsep "Tridaya" keberdayaan itu mencakup 3 daur yakni keberdayaan SDM, ekonomi produktif dan kelembagaan. Dampak dari Kemandirian penyuluh terhadap Keberdayaan petani kelapa sawit dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Keberdayaan Petani Kelapa Sawit Pola Swadaya

No	Keberdayaan	Skor	Kategori
1	Sumber daya manusia	2,48	Kurang Berdaya
2	Ekonomi produktif	2,81	Cukup Berdaya
3	Kelembagaan	3,14	Cukup berdaya
<b>Rata-rata</b>		<b>2,81</b>	<b>Cukup Berdaya</b>

Tabel 11 memperlihatkan bahwa petani kelapa sawit telah cukup berdaya terutama pada kelembagaan petani yang disusul dengan ekonomi produktif, akan tetapi keberdayaan sumberdaya manusia petani masih perlu ditingkatkan karena petani masih kurang berdaya dalam meningkatkan kualitas SDMnya.

#### Dampak Kemandirian Penyuluh Terhadap Keberdayaan Petani

Keberhasilan pembangunan sektor perkebunan tidak terlepas dari pelaku pertanian itu sendiri terutama penyuluh dan petani sebagai ujung tombak terdepan dalam kegiatan pembangunan pertanian. Keberdayaan yang mampu dicapai petani tidak terlepas dari kinerja penyuluh dalam melakukan kegiatan penyuluhan dan pembinaan pada petani. Banyak faktor yang turut menentukan terhadap kinerja penyuluh dimana salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja penyuluh adalah kemandirian penyuluh. Dampak dari kemandirian penyuluh terhadap keberdayaan petani kelapa sawit pola swadaya disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Dampak Kemandirian Penyuluh terhadap Keberdayaan Petani

No	Kemandirian	Skor	Kategori	Keberdayaan	Skor	Kategori
1	Kemandirian Ekonomi	4,51	Mandiri	SDM	2,48	Kurang Berdaya
2	Kemandirian Intelektual	3,84	Mandiri	Ekonomi	2,81	Cukup Berdaya
3	Kemandirian Pembinaan	3,96	Mandiri	Kelembagaan	3,14	Cukup berdaya
4	Kemandirian Emosional	4,08	Mandiri	<b>Rata-rata</b>	<b>2,81</b>	<b>Cukup Berdaya</b>
5	Kemandirian Sosial	4,00	Mandiri			
	<b>Rata-rata</b>	<b>4,08</b>	<b>Mandiri</b>			

Tabel 12 menunjukkan bahwa penyuluh telah mandiri dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyuluh dalam rangka merubah perilaku petani sehingga mampu bertani lebih baik, dan berbisnis lebih baik sehingga mampu meningkatkan pendapatan sehingga mampu untuk hidup lebih baik sesuai dengan tujuan penyuluhan yang ingin dicapai, akan tetapi dengan kemandirian yang dimiliki penyuluh baru mampu membuat petani cukup berdaya. Kemandirian penyuluh yang masih harus lebih ditingkatkan lagi terutama kemandirian dalam melakukan pembinaan terutama dalam pemasaran agar petani mampu mendapatkan harga yang lebih layak. Keberdayaan SDM petani perlu ditingkatkan sehingga pengetahuan dan keterampilan petani dalam melakukan pemasaran terhadap produk yang dihasilkan meningkat dan petani mampu memperkuat posisi tawarnya dan memperoleh harga yang layak. Untuk itu perlu pemerintah perlu memberikan kesempatan yang lebih kepada penyuluh untuk mengikuti pelatihan maupun kegiatan pendidikan lainnya, sehingga penyuluh memperoleh informasi dan sumber pembelajaran yang cukup yang dapat diterapkan kepada petani sesuai dengan kebutuhan petani. Dalam pemberdayaan ekonomi produktif harus lebih menekankan pada partisipasi aktif masyarakat untuk memecahkan, merumuskan, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan oleh individu ataupun bersama dalam upaya menciptakan kondisi ekonomi produktif masyarakat (Rosnita, 2012).

#### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Penyuluh telah mandiri dalam melakukan kegiatan penyuluhan. Kemandirian penyuluh ini sangat didukung dengan kemandirian ekonomi, yang tinggi disamping kemandirian emosional dan sosial, akan tetapi kemandirian intelektual dan pembinaan penyuluh perlu ditingkatkan. Kepada instansi terkait hendaknya memberikan kesempatan yang lebih banyak lagi kepada penyuluh dalam mengikuti pelatihan. Dengan demikian diharapkan kemampuan intelektual penyuluh akan meningkat sehingga penyuluh mampu mempersiapkan materi pembelajaran dan mampu membuat kegiatan penyuluhan menjadi lebih menarik.
2. Dampak dari kemandirian yang dimiliki penyuluh dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hanya mampu membuat petani cukup berdaya terutama dalam bidang ekonomi dan kelembagaan, akan tetapi petani masih kurang berdaya dalam SDM petani terutama dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani meskipun telah terjadi perubahan sikap petani kearah yang lebih baik dalam mengembangkan usahatani kelapa sawit yang dikelolanya. Diperlukan adanya upaya oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM petani sehingga mampu meningkatkan keberdayaan petani.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementrian Riset dan Teknologi atas pendanaan yang diberikan guna melakukan penelitian dengan judul Model Penyuluhan dalam Mendukung Keberdayaan dan Kemandirian Petani di Riau pada tahun 2016. Tulisan ini merupakan salah satu bagian dari penelitian yang telah dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2008. PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA-MODUL DIKLATPIM TINGKAT III. Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau. 2014. Indikator Kebutuhan Dasar Rumah Tangga Petani. Riau, Pekanbaru
- Bahara, Nasim. 2008. Kemandirian. Diakses 3 Februari 2015 <<http://www.nasheem.Blogspot.com/2008/04/kemandirian.html>>
- Bahua, Amri, dan Amiruddin, 2010. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Penyuluh Pertanian dan Dampaknya pada Perilaku Petani Jagung di Provinsi Gorontalo. Jurnal Ilmiah Agropolitan Vol.3 No.1 April 2010. Diakses 22 Mei 2016 < [https://www.google.co.id/?gws\\_rd=cr&ei=cDBBV-aBDobNvgTPtJTIDw#q=jurnal+tentang+kemandirian+intelektual+penyuluh+perkebunan+kelapa+sawit+](https://www.google.co.id/?gws_rd=cr&ei=cDBBV-aBDobNvgTPtJTIDw#q=jurnal+tentang+kemandirian+intelektual+penyuluh+perkebunan+kelapa+sawit+)>
- Bahua, Mohamad I dan Marjeni L, 2013. Model Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian di Provinsi Gorontalo. Laporan penelitian Hibah Bersaing. Diakses pada 22 Mei 2016. <<http://www.google.co.id/search?>>
- Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir 2013. Statistik Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir 2012. Rokan Hilir
- Dinas Perkebunan Provinsi Riau. 2013. Statistik Perkebunan Propinsi Riau 2012. Riau
- Direktoran Jendral Perkebunan. 2014. Luas Lahan dan Produksi Perkebunan Kelapa Sawit tiap provinsi di Indonesia. Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Pekanbaru
- Hutomo.M Yatmo, 2000. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG EKONOMI: tinjauan Teoritik dan Implementasi. Pokok pikiran disampaikan pada Seminar Sehari Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan Bappenas, tanggal 6 Maret 2000 di Jakarta
- Indraningsih Kurnia.S, *et al*, 2010. Kinerja Penyuluh dari Perspektif Petani dan Eksistensi Penyuluh Swadaya sebagai Pendamping Penyuluh Pertanian. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Desember 2010-Vol.8 No.4. Hal: 303-321
- Karsidi Ravik, 2007. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil dan Mikro (Pengalaman Empiris di Wilayah Surakarta Jawa Tengah). Jurnal Penyuluhan September 2007, Vol.3 No.2. Hal: 137-145
- Marliati, Sumardjo, Angsari S.P, Tjitropranoto. P, Saefuddin.A. (2008).Faktor-Faktor Penentu Peningkatan Kinerja Penyuluh Pertanian Dalam Memberdayakan Petani (Kasus di Kabupaten Kampar Provinsi Riau). Jurnal Penyuluhan. Vol. 4 No. 2 : 1858  
[2664journal.ipb.ac.id/index.php/jupe/article/download/2174/1203](http://2664journal.ipb.ac.id/index.php/jupe/article/download/2174/1203) Diakses 21 Februari 2015.
- Sadono, 2008. Pemberdayaan Petani: Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian. Jurnal Penyuluhan Maret 2008Vol.4 No.1. Hal: 65-74
- Syaroji, 2016. Pengaruh Kecerdasan Emosional Dan Budaya Kerja Terhadap Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana Pada Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kerawang. Diakses 22 Mei 2016 <<http://syaroji.blogspot.co.id>>
- Rosnita, Yulida R, Arifudin, 2012. Tingkat Keberdayaan Lembaga Keuangan Mikro dalam Peningkatan Produksi Kelapa Sawit di Provinsi Riau. Seminar Nasional dan Rapat Tahunan (SEMIRATA) BKS-PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian di USU Medan pada tanggal 3 April 2012
- Rosnita dan Eri Sayamar, 2014. Peranan Penyuluhan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kampar. Seminar Nasional Peranan Teknologi dan Kelembagaan Pertanian dalam Mewujudkan Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Berkelanjutan. Pekanbaru. Halaman : 254-260
- Rosnita, 2015. Kajian Kelembagaan dan Peran Penyuluhan pada Petani KelapaSawit Pola Swadaya di Provinsi Riau. Seminar Nasional Agribisnis "Inovasi Agribisnis untuk Peningkatan Pertanian Berkelanjutan". Semarang. Halaman: 80-83
- Sapar. 2011. Pengaruh Kemandirian, Motivasi, kompetensi, karakteristik penyuluh Terhadap Kinerja Penyuluh Perkebunan Kabupaten Jepara. Diakses : Senin 20 Maret 2015 < [http : Jurnal Daya Saing\\_8\\_4 doc](http://Jurnal%20Daya%20Saing%208_4.doc)>
- TKP3 KPK. 2004. Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Jakarta



## Lampiran

Lampiran 1. Jumlah Penyuluh dan Petani Sampel

	Kecamatan	Desa	Responden
Penyuluh	Kubu		8
	Langgam		5
	<b>Jumlah</b>		<b>13</b>
Petani	Kubu	Teluk Merbau	10
		Rantau Panjang Kanan	10
		Sungai Kubu	10
		Sungai Kubu Hulu	10
		Tanjung Leban	10
		Sungai Segajah	10
		Teluk Piyai dan Teluk Piyai Pesisir	10
		Sungai Segajah Makmur	10
		Langgam	Langgam
	Segati		10
	P. Luas		10
	Tambak		10
	Penarikan		10
	Gondai		10
	Langkan		10
	Sotol		10
	<b>Jumlah</b>		<b>160</b>

Lampiran 2. Variabel dan Indikator Kemandirian Penyuluh dan Keberdayaan Petani

Variabel	Indikator
<b>A. KEMANDIRIAN PENYULUH</b>	
1. Kemampuan Materi/Ekonomi	a. Kebutuhan dasar manusia
2. Kemampuan Intelektual	a. Mengambil keputusan
	b. Mempersiapkan bahaan penyuluhan
	c. Menarik partisipasi masyarakat hadir dalam kegiatan penyuluhan
	d. Melaksanakan penyuluhan lebih menarik
	e. Mempersiapkan waktu kegiatan penyuluhan
	f. Menentukan pencapaian tujuann
	g. Mempersiapkan evaluasi dan pelaporan
3. Kemampuan Pembinaan	a. Cara membina kelompokkani
	b. Membina petani dalam budidaya
	c. Membina petani dalam menentukan harga komoditi
	d. Membina petani dalam menentukan pemasaran
4. Kemampuan Emosional	a. Tidak menutup diri dalam pelaksanaan program
	b. Tidak menutup diri dalam membina petani dalam hal budidaya
5. Kemampuan Sosial	a. Membina hubungan dengan pihak lain
	b. Mengembangkan strategi adaptasi dengan berbagai pihak
<b>B. KEBERDAYAAN PETANI</b>	
1. Sumber daya Manusia	a. Peningkatan pengetahuan petani dalam budiaya sawit
	b. Perubahan sikap petani ke arah yang lebih baik dalam mengelola sawit
	c. Keterampilan petani dalam mengelola sawit meningkat
2. Ekonomi Produktif	a. Peningkatan jumlah modal
	b. Penggunaan tenaga kerja luar keluarga meningkat
	c. Peningkatan keuntungan
3. Kelembagaan kelompokkani	a. Kelompok memiliki tujuan yang jelas
	b. Tercapainya tujuan kelompok
	c. Kejelasan struktur kelompok
	d. Kemampuan kelompok dalam menyusun Rencana Definitif Kelompok (RDK)
	e. Kemampuan kelompok dalam menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

Sumber : Safar (2011), Slamet dalam Marliati (2008), dan TKP3KPK (2004)